

ABSTRAK

Penghindaran Pajak merupakan bentuk dari perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menghindarkan diri dari pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak. Dalam dunia bisnis peminatan dimana timbul dari adanya perjanjian pinjam nama oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dapat mengakibatkan penghindaran pajak tersebut dalam bentuk kelalaian Warga Negara Asing untuk memenuhi pendanaan bagi Warga Negara Indonesia sebagai pemilik secara yuridis formal agar dapat membayar kewajiban yaitu membayar pajak atas bisnis peminatan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) oleh Warga Negara Asing atas penghasilan yang diperoleh dari *nominee agreement* dengan Warga Negara Indonesia atas rumah tinggal yang digunakan untuk bisnis peminatan dan Akibat hukum dalam prespektif pertanahan dan pajak bagi Warga Negara Indonesia yang namanya digunakan oleh Warga Negara Asing dalam perjanjian rumah *nominee*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini adalah bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing merupakan perbuatan yang tidak langsung dilakukan olehnya namun melalui nama Warga Negara Indonesia sebagai nama yang terdaftar secara administrasi sehingga merugikan Warga Negara Indonesia dan Negara. Dalam peraturan perpajakan belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini sehingga kelalaian dari Warga Negara Asing tersebut menjadi tanggung jawab dari Warga Negara Indonesia sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP. Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dapat ditempuh dengan upaya hukum baik secara represif dengan mengajukan keberatan dan upaya hukum secara preventif dengan mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Kata Kunci : **Penghindaran Pajak, Perjanjian *Nominee*, Warga Negara Asing**

ABSTRACT

Tax avoidance is a form of tax resistance carried out by taxpayers by avoiding taxation, tax evasion and tax neglect. In the business world of governance, which arises from the existence of a loan agreement by a Foreign Citizen with an Indonesian citizen, this tax avoidance may occur in the form of a Foreign Citizens' neglect to meet funding for Indonesian citizens as formal juridical owners in order to pay obligations, namely paying taxes on lodging business. Therefore, the formulation of the problem raised is Tax Avoidance by Foreign Citizens for income derived from nominee agreements with Indonesian Citizens for residences used for lodging businesses and legal consequences in the perspective of land and tax for Indonesian citizens whose names used by foreign nationals in the nominee agreement. This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach. The results of this study are that tax evasion conducted by Foreign Citizens is an act that is not directly carried out by him but through the name of an Indonesian citizen as an administrative registered name so as to harm Indonesian Citizens and the State. In the tax regulations there are no rules governing this matter so that negligence of the Foreign Citizen becomes the responsibility of the Indonesian Citizen so that it can be subject to administrative sanctions and criminal sanctions as stipulated in the KUP Law. Legal protection for Indonesian citizens can be picked up by both repressive legal remedies by filing objections and preventive legal remedies by submitting appeals and lawsuits to the Tax Court

Keywords: Tax Avoidance, Nominee Agreement, Foreign Nationals